

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar S1  
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam**



**Disusun Oleh:**

**MUHAMAD IQBAL  
NIM : 1502026041**

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**

Drs. H. Maksun, M.Ag.

Perum Griyo Indo Permai A 22 Tambak Aji Ngaliyan Kota Semarang

Novita Dewi Masyithah, S.H., M.H.

Jl. Megaraya 3Kavling No. 446 Perumahan Koveri Bringin Kota Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Muhamad Iqbal

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum W'r. W'b.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhamad Iqbal

NIM : 1502026041

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum W'r. W'b.*

Semarang, 22 April 2020

Pembimbing I,



Drs. H. Maksun, M.Ag.

NIP : 196805151993031002

Pembimbing II,



Novita Dewi Masyithah, S.H., M.H.

NIP : 197910222007012011



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hanika Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA  
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)

Pada hari ini, Jum'at tanggal 17 (Tujuh Belas) bulan April tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Iqbal  
NIM : 1502025041  
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Supangat, M.Ag (Penguji 1)
2. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H (Penguji 2)
3. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag (Penguji 3)
4. M. Harun, S.Ag., M.H (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS** dengan nilai **3.86 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,

  
ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

  
RUJSTAM D.K.A.H

\*catat yang tidak perlu

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur serta Alhamdulillah saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang dengan rahmat-Nya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan penulis persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tua saya Bapak Khudori (Alm) dan Ibu Khonitin, kakakku Mufti Ali, Amnah Farida, Eli Fatiroh, Uzlifatul Jannah dan saudara-saudara saya yang selalu memberi masukan, mendukung dan mendoakan agar diberi kelancaran sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Untuk Lilik Septia Putri yang selalu menenami di waktu susah, sedih, dan bahagia tanpa lelah mendukung perjuanganku.

Sahabat pendaki gunung saya Akbar Musaffar, A. Zaim Firdausi, Nada Zimah, Dewi, Devi Sartika yang selalu menghibur di kala suntuknya suasana dengan kegiatan mendaki. Untuk teman-teman IKMAL yang selalu solid sejak di Pondok al-Hikmah hingga di kampus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tak ketinggalan pula kepada kerabat, teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, teman diskusi (Aris Nur Zamzam, Yudha Adhi P), yang selalu menemani, memberi masukan, hiburan, saling berbagi ide/pikiran dan pengalaman, sehingga saya bisa diberi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman satu desa saya, Edi Asfiya, Begjo Tohari, Fatwa Aulia, Annisatul Alfiyah, Egi Labib B, Zuanita Adriyani, Ilham Khasani, Aliyafi, dan yang lainnya. Bagi saya, kalian semua sudah seperti saudara sendiri yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan saya sehingga bisa terselesaikannya skripsi ini.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah 5 : 8)



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 April 2020

Deklarator

  
  
Muhamad Iqbal  
NIM. 1502026041

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang mengatur perilaku masyarakat dengan hukum dalam pergaulan untuk menciptakan keamanan dan kedamaian. Negara selain mengatur manusia terhadap sesama manusia, juga mengatur manusia dengan kehidupan alam sekitar diantaranya mengatur perbuatan terhadap hewan yang terdapat dalam KUHP Pasal 302, Pasal 406 Ayat (2), selain itu juga Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan Kesehatan Hewan. Manusia dituntut mengendalikan perilakunya dari perbuatan menganiaya hewan supaya terjaga kelestariannya karena hewan memiliki hak untuk hidup dan terhindar dari kekerasan. Dengan larangan penganiayaan hewan diharapkan mampu menjadi solusi pencegah perbuatan penganiayaan hewan yang kerap terjadi di Indonesia. Ini menjadi alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penganiayaan hewan dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Selain itu juga melihat sanksi dari tindak pidana penganiayaan hewan dari kedua hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Al-Qur'an, Hadist. Penelitian ini menggunakan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, hasil penelitian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan analisa yang mendalam.

Hasil penelitian adalah. Pertama, penganiayaan hewan dimasukan dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan, karena kejahatan disini mengandung sifat aniaya dan perbuatan yang tidak sopan terhadap hewan. Pemberian sanksi pidana penjara bagi pelaku penganiayaan hewan terdapat dalam Pasal 302 dan Pasal 406 Ayat (2) KUHP sebagai pertanggungjawaban pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dalam hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan hewan termasuk dalam *ja'rimah ta'zīr* karena hukumannya tidak disebutkan dengan pasti oleh *nash*. Sehingga hukuman yang akan diberikan diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan nilai keadilan yang dicari mulai dari hukuman nasehat, kurungan, sampai yang tertinggi hukuman mati.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Hukum Pidana Islam*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam KUHP”, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Keterlibatan banyak pihak tidak bisa terelakkan selama studi saya di kampus tercinta ini, meskipun penentu sebenarnya adalah saya sendiri (setelah Allah SWT dan kedua orang tua saya). Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. M. Arja Imroni, M.Ag. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan, yang telah merestui dan menyetujui pembahasan skripsi ini. Para Dosen Fakultas Syariah & Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak/Ibu Kepala Perpustakaan Fakultas dan Universitas yang telah memberi fasilitas berupa referensi dan data pendukung untuk menyelesaikan penelitian ini. Kedua orang tua, keluarga, penyemangat, sahabat, dan teman seperjuangan yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Yang terakhir, saya memohon kepada Allah SWT semoga melimpahkan kemanfaatan dan keberkahannya atas semua ini.

Pada akhirnya penulis minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 12 April 2020

Penulis



Muhamad Iqbal  
NIM. 1502026041

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
نِي	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai	A dan I
نَوْ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( اِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah) . Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

#### G. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafẓ Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [ t ].

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Motto .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Deklarasi .....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>vii</b>
<b>Halaman Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Transliterasi Arab .....</b>	<b>ix</b>
<b>Halaman Daftar Isi .....</b>	<b>xv</b>

## **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Metodologi Penelitian .....	14
F. Sistematika Penulisan .....	17

## **BAB II : KETENTUAN PIDANA POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN**

A. Pengertian Tindak Pidana .....	18
B. Pengertian Penganiayaan .....	21
C. Penganiayaan Hewan .....	22
D. Pengertian <i>Jarimah</i> .....	25
E. Pengertian Penganiayaan .....	28
F. Pengertian <i>Ta'zir</i> .....	32
G. Macam-macam <i>Jarimah Ta'zir</i> .....	34



**BAB III: SANKSI PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP DAN HUKUM  
PIDANA ISLAM**

- A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Positif  
..... 36
- B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Islam  
..... 46

**BAB IV: ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP**

- A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.52
- B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan  
..... ..58

**BAB V: PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 67
- B. Saran ..... 68
- C. Penutup ..... 68

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa serta mempunyai sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya. Pada hakekatnya tujuan diciptakan hukum agar tercipta kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Namun pada kenyataannya dalam masyarakat masih bermunculan berbagai tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa tujuan hukum itu belum terwujud sepenuhnya.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Perbuatan pidana dapat pula dikatakan tindak pidana, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang.<sup>1</sup>

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, hal ini merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

<sup>2</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 6.

dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>3</sup>

Kejahatan bukanlah sesuatu yang fitrah pada diri manusia. Kejahatan bukan pula profesi yang diusahakan manusia, juga bukan penyakit yang menimpa manusia. Kejahatan atau *jināyah* atau disebut juga *jarimah* menurut bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus yaitu agama. Sedangkan kejahatan menurut kamus hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan seiring perkembangan jaman segala tindak kejahatan sudah sangat banyak, termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan. Oleh karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan di Indonesia, dibuatlah peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 406 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT.RefikaAditama,2002) , hlm. 15.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 21.

Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>5</sup>

Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.<sup>6</sup> Dalam hal perbuatan tidak memberi makan dan minum dengan cara yang melampaui batas, di mana seorang pemilik ataupun di bawah pengawasannya hewan itu, dia tidak memberikan makan atau minum kepada hewan yang ada dalam pengawasannya selama satu minggu atau beberapa bulan, sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan. Karena ada unsur kesengajaan dalam hal tidak memberi makan dan minum, sehingga hewan tersebut kelaparan dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati.<sup>7</sup>

Penganiayaan terhadap hewan atau binatang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk tidak disiksa. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan, hukuman adalah suatu *res absoluta ab effectu futuro*.<sup>8</sup> Melihat ketentuan lebih lanjut di

---

<sup>5</sup> Jonathan Toar Mampow, *Suatu kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, April 2017

<sup>6</sup> Chazawi Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 180

<sup>7</sup> *Ibid.* Hlm. 181

<sup>8</sup> E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 149.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang penganiayaan terhadap hewan yakni Pasal 302 dan Pasal 406 Ayat (2) KUHP.

Untuk memidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya, disyaratkan terlebih dulu harus ada ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu dilarang dan dapat dipidana.<sup>9</sup> Perlindungan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan terdapat di dalam Pasal 302 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.

KUHP Pasal 406 Ayat (2) berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bisa dikatakan bahwa pada prinsipnya Indonesia merupakan negara yang ramah satwa. Apabila melihat penjelasan di atas maka kejahatan terhadap penganiayaan hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum terhadap kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 171.

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

tersebut terutama sanksi pidananya. Berdasarkan pengaturan yang sudah diatur lewat undang-undang di atas sudah sangat jelas, seharusnya hal ini lebih diperhatikan oleh penegak hukum untuk menjalankan apa yang sudah menjadi tanggungjawab dalam melindungi hewan. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja melegalkan penyiksaan hewan. Hukum di Indonesia saat ini melemah, dikarenakan para penegak hukum hanya melihat hewan peliharaan biasa saja. Padahal hewan mempunyai hak hidup yang sama seperti manusia, untuk memiliki hak hidup dan mendapatkan kesejahteraan. Undang-undang sudah menjamin dan melindungi kesejahteraan bagi hewan, namun kenyataannya yang ada masih banyak kejahatan yang terjadi terhadap hewan.<sup>11</sup>

Pengaturan lainnya terdapat di dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau meyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Selanjutnya Pasal 66A Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.<sup>12</sup>

Maksud Pasal tersebut menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar dan atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat pegawai negeri sipil atau orang yang berwenang yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

---

<sup>11</sup> Widya Dika Chandra, *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Hewan di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Novum vol. 3 no. 1, September 2019

<sup>12</sup> UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Islam adalah agama yang mengedepankan keadilan, bahkan sering diidentikan sebagai agama yang sempurna.<sup>13</sup> Hukuman dalam ajaran Islam memiliki dua tujuan, yakni tujuan pencegahan dan tujuan pendidikan. Maksud dari tujuan pencegahan adalah bahwa hukuman diberlakukan untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman tersebut. Sedangkan maksud dari tujuan pendidikan adalah bahwa hukuman yang diberikan ditujukan agar orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani.<sup>14</sup>

Hukum pidana Islam merupakan syari'at Allah SWT yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupan manusia dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syari'at dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syari'at, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT yang harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.<sup>15</sup>

Hukum asal dalam Islam adalah menghormati binatang ternak dan tidak menyakitinya dengan cap, atau melobanginya, atau memberinya anting-anting, sebagian atau semuanya atau selain hal tersebut, kecuali karena kebutuhan yang nyata. Seperti ingin memberikan identitas sebagai tanda pengenalan untuknya atau selainnya berupa cap/tanda dengan api di bagian tubuh selain wajah, atau membelah punuk unta yang dibawa sebagai *qurban* (saat berhaji). Hal tersebut tidak apa-apa selama masih dalam batas kebutuhan dan tujuan yang benar.<sup>16</sup> Telah diriwayatkan dalam *ash-shahihain*, dari Anas RA, ia berkata, “saya pergi kepada Rasulullah dengan membawa Abdullah bin Thalhah untuk *mentahniknya*, maka saya memergoki beliau ditangannya ada tanda untuk memberi tanda pada unta

---

<sup>13</sup> Topo santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 72.

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 255

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 10.

<sup>16</sup> Syaikh abdul aziz bin Abdullah bin Baz *et al*, *Fatwa-fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 701.

sedekah.”<sup>17</sup> Dan menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, “saya melihat Rasulullah memberi tanda pada kambing ditelinganya.”<sup>18</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ،  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا  
بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَرَ عَثَ مَوْقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغَفَرَ لَهَا بِهِ "

Artinya: Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Isra'il lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu) kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu".<sup>19</sup>

Dan dalam Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "  
عَذِّبَتْ أَمْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا  
"سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuanhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati. Maka ia masuk neraka karena hal itu. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika

<sup>17</sup> HR. al-Bukhari dalam *az-Zakat*, no. 1502; Muslim dalam *al-Libas*, no. 2119.

<sup>18</sup> HR. Ahmad, no. 12339; Ibnu Majah dalam *al-libas*, no. 3565; lihat al-Bukhari dalam *adz-Dzaba'in*, no. 5542.

<sup>19</sup> HR. al-Bukhari no. 3482



menahannya, dan dia pun tidak membiarkannya (melepaskannya) makan dari binatang (rayap) tanah.”<sup>20</sup>

Hukum pidana Islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebagai *ja'rimah*, yaitu perbuatan yang oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* bagi pelakunya.<sup>21</sup> Dalam sudut pandang Islam penganiayaan hewan termasuk dalam *ja'rimah ta'zir* karena jenis hukumannya tidak disebutkan oleh *nash* tetapi diserahkan kepada hakim berdasarkan kearifannya, selain itu penganiayaan hewan merupakan perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum (*ta'zir lilmashlahati 'ammah*).

*Ta'zir* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya tidak maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya *mubah*. Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.<sup>22</sup>

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zir* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ , إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abi Burdah al-Anshori r.a sesungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda: "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah.” (HR. Muttafaq ‘Alaih).<sup>23</sup>

<sup>20</sup> HR. Muslim, no. 2242

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 10.

<sup>22</sup> Rokhmadi, *Hukum pidana Islam*, (Smarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), hlm. 196

<sup>23</sup> Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya 1983), hlm. 255

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْبِلُوا دَوِي  
الْهَيْئَاتِ عَتَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi saw bersabda: “Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *ja'rimah-jarimah* hudud.” (HR. Ahmad, Abu Dawud-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).<sup>24</sup>

Secara umum kedua hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syari'at Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *ja'rimah hudud*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang *jarimah ta'zīr*. Sedangkan hadits yang kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda penerapannya, antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status pelaku dan hal lainnya.<sup>25</sup>

Dari pemaparan di atas bahwa tindak pidana penganiayaan terhadap hewan adalah salah satu kejahatan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang tepat untuk menyelesaikan agar hewan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Lebih jauh lagi penulis memberikan pandangan lain yakni dari hukum Islam karena sampai saat ini hukum Islam belum memberikan solusi konkrit apapun tentang bagaimana menangani tindak kejahatan penganiayaan hewan. Maka, skripsi ini penulis beri judul: **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam KUHP.**

<sup>24</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002, Cet. 26, hlm. 576-577

<sup>25</sup> Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 141-142

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah :

1. Bagaimana sanksi penganiayaan hewan menurut KUHP dan hukum pidana Islam?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam KUHP?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah faktor paling penting dalam suatu penelitian. Tujuan ini akan memberikan gambaran bagaimana arah penelitian yang akan dilakukan. Maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi penganiayaan hewan dalam KUHP dan hukum pidana Islam
2. Untuk menganalisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam KUHP

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah:

1. Secara teoritis
  - a) Memberi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya
  - b) Untuk memberi sumbangan pengetahuan secara ilmiah mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan hewan

## 2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

### a) Kepolisian

Sebagai bahan masukan bagi pihak kepolisian dalam upaya memberantas tindak pidana penganiayaan hewan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum.

### b) Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana khususnya tentang tindak pidana penganiayaan hewan dan menambah referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

### c) Masyarakat

Sebagai sarana pengetahuan tentang tindak pidana penganiayaan hewan serta upaya yang dilakukan bila menemukan suatu tindak pidana penganiayaan hewan yang terjadi pada masyarakat sekitar.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan dengan singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya, sehingga dengan adanya upaya ini diharapkan dapat menghindari dari adanya anggapan plagiat.

1. Skripsi yang ditulis oleh Thrischa Vidia Kusuma, tahun 2016, Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Analisis Tindak Pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Karapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura”.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan hewan dalam pelaksanaan tradisi karapan sapi di Kabupaten Bangkalan, Madura masih dilakukan oleh masyarakat meskipun terdapat peraturan yang melarang tindakan penganiayaan terhadap hewan. Peraturan tersebut adalah

Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang *Juncto* Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan dan Intruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk tindakan penganiayaan terhadap hewan serta bagaimana penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi perbuatan tersebut.<sup>26</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Stovia Saras, tahun 2018, Mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung yang berjudul “Penegakan Hukum Oleh kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi pada Polres Lampung Tengah)”,

Hasil penelitiannya Penegakan hukum oleh Polres Lampung Tengah terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dalam penegakan hukum pidana. Tahap aplikasi ini dilaksanakan oleh penyidik Polres Lampung Tengah terhadap dengan penyidikan yang dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam satu bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima dan dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan diproses secara hukum oleh Kepolisian telah selesai dan selanjutnya diproses secara hukum oleh pihak Kejaksaan dan Pengadilan.

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan terdiri dari substansi hukum yaitu rendahnya ancaman terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 91B Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu minimal hanya 1 bulan dan maksimal

---

<sup>26</sup> Thrischa Vidia Kusuma, *Analisis Tindak Pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Karapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Suarakarta 2016

hanya 3 bulan. Faktor aparat penegak hukum, yaitu terbatas kuantitas penyidik Polri, sehingga membutuhkan bantuan PPNS dari Dinas Kehutan dan Perkebunan Provinsi Lampung. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tidak adanya klinik khusus hewan di Kabupaten Lampung Tengah, yang berguna untuk memastikan bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap hewan<sup>27</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh I Gusti Made wiratama tahun 2006, mahasiswa Universitas Udayana Denpasar yang berjudul “Pertanggung jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP”

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa larangan penganiayaan hewan telah tercantum dalam UU No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga dalam KUHP. Sehingga tidak dibenarkan bagi setiap orang melakukan penganiayaan terhadap hewan. Apabila hal itu dilakukan maka pelaku harus mempertanggungjawabkan akibat hukum dari perbuatannya. Seorang dituntut bertanggungjawab apabila memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal undang-undnag tersebut sehingga tidak serta merta menghukum orang tanpa pembuktian yang jelas. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah “barang siapa” yaitu setiap subjek hukum yang sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan, unsur selanjutnya adalah “dengan sengaja” melukai yaitu ada niat dalam hati untuk menyakiti hewan tanpa adanya kelpaan dalam melakukan. Masalah penerapan sanksi tidak terlepas dari tujuan pembedanaan itu sendiri yaitu untuk mengukur sejauh mana penerapan sanksi pidana itu dapat mencapai tujuan hukum secara efektif sehingga memberikan efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Stovia Saras, *Penegakan Hukum Oleh kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi pada Polres Lampung Tengah)*, Skripsi Universitas Lampung Bandar Lampung 2018.

<sup>28</sup> I Gusti Made Wiratama, *Pertanggung jawaban Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP*, Skripsi Universitas Udayana Denpasar 2006

4. Jurnal yang ditulis oleh Widya Dika Chandra tahun 2018 yang berjudul “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta” jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Penegakan hukum Pasal 302 KUHP yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap proses pemotongan anjing yang memuat unsur kekejaman terhadap hewan tidak pernah dilakukan, karena aparat kepolisian merasa tidak ada yang dirugikan terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan ini. Hambatan yang dihadapi oleh aparat Kepolisian Resor Kota Surakarta dalam menegakkan Pasal 302 KUHP, pertama. Faktor penegak hukumnya sendiri dimana aparat kepolisian sebagai penegak hukum bersikap pasif terhadap keberadaan tindak pidana penganiayaan hewan ini. Kedua. Faktor masyarakatnya sendiri yaitu pelaku penganiayaan hewan tidak memahami bahwa perbuatannya memuat unsur penganiayaan hewan. Upaya dalam penegakan hukum Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan terhadap hewan di Kota Surakarta tidak ada upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk menangani hambatan-hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan hewan.<sup>29</sup>
5. Jurnal yang ditulis oleh Jonathan Toar Mampow tahun 2017 yang berjudul “Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan” jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan dalam pemeliharaan hewan peliharaan di Indonesia merupakan suatu bentuk kepedulian pemerintah dalam melindungi, dan menjamin kebebasan hewan peliharaan melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi kesadaran dari masyarakat dan aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dalam menjaga dan melindungi kebebasan hewan peliharaan masih lemah. Sebagaimana manusia yang merupakan ciptaan Tuhan yang mempunyai hak untuk hidup, begitu juga dengan hewan peliharaan yang mempunyai hak untuk memiliki hidup yang bebas dari penyiksaan dan rasa tertekan yang dilakukan oleh manusia.

---

<sup>29</sup> Widya Dika Chandra, *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Novum vol. 3 no. 1, September 2019

Perlindungan dan jaminan kesejahteraan serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan peliharaan sampai saat ini belum adanya upaya yang tegas baik dari penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan dari undang-undang dan menurut penelitian yang ada seseorang yang terbiasa melakukan penyiksaan kepada hewan, tanpa menutup kemungkinan orang tersebut bisa melakukan hal yang sama kepada manusia.<sup>30</sup>

Walaupun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah tindak pidana penganiayaan hewan sudah ada, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian yang penulis papakan pada penelitian tersebut pada intinya belum menyentuh masalah tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum Islam. Oleh karena itu bedanya penelitian penulis ini adalah meneliti tindak pidana penganiayaan hewan tidak hanya dikaji dari hukum positif tetapi juga dari hukum Islam, juga untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang tindak pidana penganiayaan hewan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif (doktrinal) adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan<sup>31</sup> Penulis menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Al-Qur'an, Hadist.

---

<sup>30</sup> Jonathan Toar Mampow, *Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, April 2017

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011), hlm. 144.



## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.<sup>32</sup> Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber data. Sumber data penelitian penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>33</sup> Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autotiratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan, putusan hakim.

Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang menjadi dasar penelitian adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, KUHP, Al-Qur'an, Al-hadist.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kitab fiqh, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rinek Cipta, 1993), hlm. 120.

<sup>33</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm 156

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 141.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengambilan Data

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>35</sup> Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.<sup>36</sup>

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan teknik pengambilan data dokumentasi karena hanya mengumpulkan data-data berupa Undang-undang, buku, jurnal, dan sebagainya untuk diteliti. Jenis-jenis data sudah disebutkan dalam sumber-sumber data di atas.

## 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Analisis Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.<sup>37</sup> Penulis menganalisis Pasal KUHP dan hukum Islam tentang penganiayaan hewan serta mengkategorikan sanksi-sanksi dari perbuatan tersebut untuk mendapatkan uraian data yang jelas.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), hlm. 66

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.131

<sup>37</sup> Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika 2004) hlm. 105

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab, yang mana disetiap babnya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu sama lain, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam kesatuan yang utuh dan benar.

**Bab I** : Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan dan manfaat penelitian, yang bertujuan bias memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka, telaah teori, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

**Bab II** : merupakan pembahasan tinjauan teoritis tentang tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif dan hukum Islam. Meliputi pengertian tindak pidana, pengertian penganiayaan, pengertian *ja'rimah*, pengertian *ta'zir*, macam-macam *ta'zir*.

**Bab III** : dalam bab ini berisi tentang sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan menurut hukum positif dan hukum pidana Islam, serta contoh kasus penganiayaan berdasarkan putusan pengadilan.

**Bab IV** : berisi tentang analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif dan hukum pidana Islam. Bab ini merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dimana penulis akan menganalisis penganiayaan hewan menurut KUHP kemudian menganalisis hukum penganiayaan hewan dalam perspektif hukum pidana Islam.

**Bab V** : merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup. Daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

## BAB II

### KETENTUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN

#### A. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Positif

##### 1. Pengetian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.<sup>38</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang biasa dipakai dalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak-gerik seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak

---

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 59.

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012), hlm. 18

pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbulnya kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”. Dalam perundang-undangan negara Indonesia dapat dijumpai istilah tindak pidana dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”<sup>40</sup>

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>41</sup>

Konsep tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara. Hal ini diperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.

Di dalam pembagian hukum konfesional, hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih oleh kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>41</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafiika Persada, 2014), hlm. 49-50.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Ketentuan dalam KUHP tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*Misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*Over Tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas.

Kejahatan adalah “*Recht Delicten*” yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai “*Onrecht*” sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>43</sup>

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana memenuhi unsur-unsur delik, ia dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>44</sup> Selanjutnya terhadap suatu perumusan tentang kejahatan maka yang perlu diperhatikan adalah antara lain :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*Criminal Intent Mens Rea*).
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberikkan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 71

<sup>44</sup> Soedjono Dirjosisworo, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara 1994). hlm. 12

<sup>45</sup> Soedjono soekanto, *Hukum pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997, hlm. 44.

## 2. Pengertian Penganiayaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Penganiayaan adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”. Sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata (aniaya) yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).<sup>46</sup>

Secara umum, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan suatu perilaku, baik terbuka, tertutup, menyerang, maupun bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Kekerasan terbuka adalah kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian, sedangkan kekerasan tertutup adalah kekerasan yang tidak secara langsung, seperti mengancam. Di sisi lain, ada pula istilah kekerasan agresif, yakni kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan diri, tetapi dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sementara itu, istilah kekerasan defensif adalah kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.<sup>47</sup>

Adapun menurut para ahli penjelasan penganiayaan sebagai berikut :

Menurut Haryatmoko, penganiayaan adalah :

penganiayaan merupakan prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Kekerasan mengandung unsur dominasi terhadap pihak lain, baik dalam bentuk fisik, verbal, moral, maupun psikologis.<sup>48</sup>

Menurut M.H. Tirtaamidjaja, penganiayaan adalah :

Dengan sengaja menyebabkab sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tersebut, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 48

<sup>47</sup> Mochamad Riyanto Rasyid, *Op.cit*, hlm. 73

<sup>48</sup> Haryatmoko, *Op.cit*, hlm. 127.

<sup>49</sup> Ledeng Marpau, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 5

Menurut M. Marwan dan Jimmy, Penganiayaan adalah :

Hal yang bersifat atau berciri khas yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain kerusakan fisik, atau barang atau paksaan.<sup>50</sup>

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan adalah :

Dalam pengertian tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.<sup>51</sup>

Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai, sehingga basah. Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringan dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.<sup>52</sup>

### 3. Penganiayaan Hewan

Penganiayaan terhadap hewan atau binatang merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Hewan juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk tidak disiksa. Perbuatan melawan hukum dianggap sebagai unsur dari setiap tindak pidana. Dengan adanya perbuatan penganiayaan hewan tersebut sudah sepatutnya pelaku penganiayaan hewan dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya. Menjatuhkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya sebagai konsekwensi dilakukannya kejahatan, hukuman adalah suatu *res absoluta ab effectu futuro*.<sup>53</sup>

Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan

<sup>50</sup> M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009), hlm. 343

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, *Op.cit*, hlm. 12.

<sup>52</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 97.

<sup>53</sup> E. Utrecht, *Op.cit*, hlm. 149.



yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan. Setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.<sup>54</sup>

Kehidupan manusia selain berhubungan dengan manusia lain sebagai sistem sosial, juga berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbang lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnya pun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi.<sup>55</sup>

Penganiayaan terhadap hewan tidak hanya dianggap melanggar etika moral, tapi juga melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan hewan tetap dilakukan dan tidak ada tindakan hukum sama sekali, maka sama halnya dengan membiarkan atau melegalkan perilaku penyiksaan hewan. Mengingat adanya kasus penganiayaan hewan, beberapa kelompok pecinta hewan mendirikan organisasi-organisasi untuk menampung dan mengatasi kekerasan terhadap hewan. Organisasi yang berada di Indonesia contohnya seperti Animal Defender, Animal Friends Jogja, BAWA (Bali Animal Welfare Association), JAAN (Jakarta Animal Aid Network), dan Garda Satwa Indonesia. Organisasi-organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak di bidang penampungan hewan yang mengalami kekerasan, penelantaran, dan penganiayaan. Organisasi ini menyelamatkan, menampung, serta memberikan rumah baru bagi para hewan yang mengalami kekerasan dan penelantaran. Mereka juga aktif menumbuhkan kesadaran masyarakat melalui berbagai macam kegiatan dan kampanye.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>55</sup> Omara Ojungu, *Interaksi Manusia dengan Alam*, (Jakarta: Pelita Ilmu, 1991), hlm.15.

<sup>56</sup> Prisilia Resolute. *Humanizing the Non-Human Animal: the Framing Analysis of Dogs' Rights Movement in Indonesia*. Jurnal Sosiologi pada Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. Jakarta 2016

Pada dasarnya pengaturan terhadap tindak pidana penganiayaan hewan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 302 KUHP yang berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.

Pasal 406 Ayat (2) yang berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.<sup>57</sup>

## **B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian *Ja'rimah***

Kata *ja'rimah* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, dan atau delik pidana.<sup>58</sup> Para fuqaha sering juga menggunakan istilah *ja'rimah* sama dengan *jināyah*. Dari segi etimologi, kata

<sup>57</sup> Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP)

<sup>58</sup> Haliman, *Hukum Pidana Syari'at islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 64.

*ja'rimah* (جريمة) merupakan kata jadian (مصدر) dari kata *jarama* (جرم) yang berarti berbuat salah, sehingga *ja'rimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *ja'rimah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>59</sup>

Lebih spesifik lagi kata *ja'rimah* menurut Abu Zahrah ialah :

الجريمة هو الامر المحظور الذي يكون فيه عقاب يقرره القضاء

Artinya: Kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum syara' yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut al-Mawardi ialah :

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير

Artinya: *ja'rimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman (*hadd*) atau *ta'zīr*.<sup>61</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, kata *ja'rimah* diartikan sebagai berikut: “*jinayah* ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara' untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara' yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.”<sup>62</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*ja'rimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.

<sup>59</sup> Audah 'Abdul al-Qadir, Op, Cit. hlm. 53-54.

<sup>60</sup> Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, t.th., *al-Jarimah*, (Mesir: Dar al- Fikr al-Arabi), hlm. 28.

<sup>61</sup> Al-Mawardi, Abi al-Hasan Abi bin Muhammad bib Habib al-Basri al-Baghdadi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Walayah ad-Diniyyah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1973). hlm. 219

<sup>62</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990), hlm. 7.

Definisi tindak pidana (*ja'rimah/jināyah*) di atas mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif (komisi) maupun secara pasif (omisi) dihitung sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan oleh syari'at. Singkatnya, jika komisi atau omisi dari suatu perbuatan tidak membawa kepada hukuman yang ditentukan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.<sup>63</sup>

Pengertian *ja'rimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at islam tidak membedakannya, semuanya disebut *ja'rimah* atau *jināyah* mengingat sifat pidananya. Suatu perbuatan dianggap *ja'rimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>64</sup>

Hukum pidana Islam baru dapat diberlakukan manakala telah ada *nash* atau ketentuan hukum yang telah mengaturnya. Apabila belum ada ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam salah satu firman-Nya Q.S. al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul” (al-Isra' : 15)

Dari uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa *jināyah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah perbuatan

<sup>63</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 20.

<sup>64</sup> Ahmad Hanafi, *Op.cit*, hlm.1

tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara' (Hukum Islam). Apabila perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, kehormatan dan harta benda.<sup>65</sup> Dengan demikian tindak pidana mengandung arti bahwa tiada suatu perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif dihitung sebagai suatu tindak pidana kecuali hukuman yang khusus untuk perbuatan atau tidak berbuat itu telah ditentukan dalam syariat yang merupakan syariat dari Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Sebagaimana menurut pemikiran 'Audah yang mengkategorikan tindak pidana atau *ja'rimah* menjadi tiga bagian;

### 1. *Ja'rimah Hudud*

*Ja'rimah Hudud* ialah *ja'rimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).

### 2. *Ja'rimah Qisās-Diyāt*

*Ja'rimah qisās-diyāt* ialah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *qisās* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisās/diyāt*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut *Khallaf* pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*, jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban).

### 3. *Ja'rimah Ta'zīr*

*Ja'rimah ta'zīr* ialah *ja'rimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa (hakim).

Berdasarkan pembagian *ja'rimah* menurut 'Audah di atas, juga diperjelas lagi oleh Abu Zahra yang menyatakan bahwa *ja'rimah* (tindak pidana) yang sudah

---

<sup>65</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009) hlm. 83

dikategorikan sebagai *jarimah hudud* itu bersifat tetap dan pasti, artinya tidak dapat diubah-ubah atau ditawar-tawar lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah.

Sedangkan *jarimah qisās-diyāt* yang dikategorikan sebagai hak manusia, hukumannya bisa diganti dengan hukuman *diyāt* (denda/ganti rugi), bahkan bisa dihapuskan sama sekali hukumannya berdasarkan pemaafan dari pihak korban atau keluarganya. Dikarenakan dalam *jarimah qisās* ada pemberian hak bagi keluarga korban yang berperan sebagai “lembaga pemaaf”. Dengan demikian, mereka bisa menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana (restoratif)<sup>66</sup>

## 2. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah tindak pidana atas selain jiwa atau *jināyat* selain pembunuhan. Yang artinya setiap tindakan haram yang dilakukan terhadap anggota tubuh, baik dengan cara memotong, melukai maupun menghilangkan fungsinya.<sup>67</sup> Tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.<sup>68</sup>

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia abaik berupa pemotongan anggota badan, melukai, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap dan tidak terganggu.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Rokhmadi, *Op.cit*, hlm. 5-7

<sup>67</sup> Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah : Abu Ihsan, (Jakarta:Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm. 319

<sup>68</sup> Abd Al-Qodir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-A'rabi, tanpa Tahun), hlm. 204.

<sup>69</sup> A. Djazuli, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 3

Penganiayaan terbagi kepada dua, yaitu :

## 1. Penganiayaan sengaja

Penganiayaan Sengaja adalah kesengajaan pelaku *jarimah* melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya.<sup>70</sup> Pengertian tindak pidana selain jiwa dengan sengaja, seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah :

فالعمد هو ما تعمده فيه الجاني الفعل بقصد العدوان

Artinya: Perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum.<sup>71</sup>

Dari definisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.<sup>72</sup>

## 2. Penganiayaan Tidak Sengaja

Penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku *jarimah* melakukan perbuatan yang mencederakan anggota badan si korban atau memberi dampak terhadap keselamatannya yang dilakukan tanpa ada kesengajaan. Artinya pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, tetapi dalam kenyataannya terdapat korban atas perbuatannya itu.<sup>73</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dikategorikan sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Adapun tidak sengaja dilakukan akibat adanya kesalahan, yakni pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum.

<sup>70</sup> Muchammad Ichsan dan Endrio Susila, *Op.cit* hlm. 178

<sup>71</sup> Abd Al-Qodir Audah, *op. cit.*, hlm. 20

<sup>72</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 180.

<sup>73</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 180

adapun bila dilihat dari segi objek atau sasarannya, terbagi kepada empat bagian, yakni ;

1. Penganiayaan atas anggota badan dan semacamnya.
2. Penghilangan manfaat anggota badan sedangkan jenisnya masih tetap utuh.
3. Pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala secara mutlak, atau sering disebut *al-syajjaj*
4. Pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala atau sering disebut dengan *al-jiroh* yang meliputi leher, dada, perut, sampai batas pinggul.<sup>74</sup>

Hukum asal dalam Islam adalah menghormati binatang dan tidak menyakitinya dengan cap, atau melobanginya, atau memberinya anting-anting, sebagian atau semuanya atau selain hal tersebut, kecuali karena kebutuhan yang nyata. Seperti ingin memberikan identitas sebagai tanda pengenalan untuknya atau selainnya berupa cap/tanda dengan api di bagian tubuh selain wajah, atau membelah punuk unta yang dibawa sebagai *qurban* (saat berhaji). Hal tersebut tidak apa-apa selama masih dalam batas kebutuhan dan tujuan yang benar.<sup>75</sup> Telah diriwayatkan dalam *ash-shahihain*, dari Anas RA, ia berkata, “saya pergi kepada Rasulullah dengan membawa Abdullah bin thalhah untuk *mentahniknya*, maka saya memergoki beliau ditangannya ada tanda untuk memberi tanda pada unta sedekah.”<sup>76</sup> Dan menurut riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, “saya melihat Rasulullah memberi tanda pada kambing di telinganya.”<sup>77</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ،  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

<sup>74</sup> Asep Saepuddin Jahar *et al*, *Op.cit*, hlm. 160

<sup>75</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *et al*, *Op.cit*, hlm. 701.

<sup>76</sup> HR. al-Bukhari dalam az-Zakat, no. 1502; Muslim dalam *al-Libas*, no. 2119.

<sup>77</sup> HR. Ahmad, no. 12339; Ibnu Majah dalam *al-libas*, no. 3565; lihat al-Bukhari dalam *adz-Dzaba'in*, no. 5542; Muslim dalam *al-Libas*, no. dibawah 2119.



عليه وسلم " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا  
بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَزَعَتْ مُوقَهَا فَسَقَّتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ "

Artinya: Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Isra'il lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu) kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu".<sup>78</sup>

Dan dalam Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَصْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَصْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "   
عَذِّبَتْ أَمْرَأَةً فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا  
"سَقَّتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ حَشَاشِ الْأَرْضِ

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati. Maka ia masuk neraka karena hal itu. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika menahannya, dan dia pun tidak membiarkannya (melepaskannya) makan dari binatang (rayap) tanah."<sup>79</sup>

### 3. Pengetian *Ta'zīr*

Menurut bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.<sup>80</sup> *Ta'zīr* yang berarti menolak dan mencegah karena *ta'zīr* bertujuan supaya perbuatan tersebut tidak diulangi baik oleh pelaku atau orang lain, sedangkan *ta'zīr* yang berarti mendidik

<sup>78</sup> HR. al-Bukhari no. 3482

<sup>79</sup> HR. Muslim, no. 2242

<sup>80</sup> Ahmad Wardi Muslich. op.cit. hlm. 248

karena *ta'zīr* bersifat mendidik baik untuk pelaku atau orang lain agar berperilaku yang baik dan benar.

Sedangkan secara terminologis *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.<sup>81</sup>

*Ja'rimah ta'zīr* menurut Audah adalah *ja'rimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*, dan dalam ketentuan syari'ah, jika tidak ada batasan hukumannya, maka masuk kategori *ja'rimah ta'zīr*, yaitu semua *ja'rimah* yang belum/tidak ditentukan kadar hukumannya.<sup>82</sup>

Sedangkan menurut Abu Zahrah bahwa *ja'rimah ta'zīr* adalah tindak pidana (*ja'rimah*) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang (الشارع) dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga pengadilan)<sup>83</sup>

Dari definis-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *ja'rimah-ja'rimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Di kalangan fuqaha, *ja'rimah- ja'rimah* yang hukumannya belum di tetapkan oleh syara' dinamakan dengan *ja'rimah ta'zīr*. Jadi, istilah *ja'rimah ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *ja'rimah* (tindak pidana).

Dapat disimpulkan bahwa *ta'zīr* yaitu sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana atau *ja'rimah* yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori *ja'rimah hudud* atau *kafarat*. Ini menjadikan kompetensi bagi penguasa setempat dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr*, harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.<sup>84</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan-penentuan *ja'rimah ta'zīr* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.<sup>85</sup>

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *Op.cit*, hlm. 151.

<sup>82</sup> Abd Al-Qodir Audah, jilid I, *op, cit*, hlm. 64.

<sup>83</sup> Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, t.th., *al-Jaimah*, (Mesir. Dar al-Fikr al-Arabi), hlm. 75

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit*, hlm. 255.

<sup>85</sup> *ibid*

Dari paparan di atas *ta'zīr* memiliki ciri-ciri yang sangat jelas yaitu hukumannya tidak ditentukan oleh nash baik al-Qur'an dan Hadist sehingga jenis hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim dan apabila sudah ada hukuman *hudud* yang mengancam maka hukuman *ta'zīr* tidak dapat dilaksanakan.

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam hadits Nabi Muhammad saw. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut :

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ , إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a, dia berkata, saya mendengar Nabi saw bersabda: "tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah." (HR. Muttafaq 'Alaih).<sup>86</sup>

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثْرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

Artinya: Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam *jarimah-jarimah hudud*." (HR. Ahmad, Abu Dawudl-Nasa'i, dan Al-Baihaqi).<sup>87</sup>

Secara umum kedua hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi *ta'zīr* dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang batasan hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarimah hudud*. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk *jarimah hudud* dan mana yang *jarimah ta'zīr*. Sedangkan hadits yang kedua mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman *ta'zīr* yang bisa berbeda penerapannya, antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada status pelaku dan hal lainnya.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Hussein Bahreisj, *Op.cit*, hlm. 255

<sup>87</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Op.cit*, hlm. 576-577

<sup>88</sup> Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Op.cit*, hlm. 141-142

#### 4. **Macam-macam *Ja'rimah Ta'zīr***

Menurut 'Audah, *ta'zīr* dibagi menjadi tiga macam : *ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat (*ta'zīr 'alal ma'ashi*), *ta'zīr* untuk kepentingan umum (*ta'zīr lilmashlahati 'ammah*), *ta'zīr* karena pelanggaran (*ta'zīr 'alal mukhalafati*).<sup>89</sup>

Yang dimaksud maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak dilakukan. Para ulama telah sepakat bawa *ta'zīr* adalah semua perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*hadd*) maupun *kaffarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami.

Adapun *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zīr* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang banyak.<sup>90</sup>

Sedangkan *ta'zīr* untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Jika sifat tersebut ada, maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya *mudah*. Sifat yang menjadi alasan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Jika dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenakan hukuman.

Penjatuhan *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW. Yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. setelah diketahui bahwa ia tidak mencurinya, maka Rasulullah melepaskannya. atas dasar tindakan Rasulullah SAW. tersebut bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr*, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu

<sup>89</sup> Abd Al-Qodir Audah, *op.cit*, hlm. 106

<sup>90</sup> Ibid, hlm. 107

tindak pidana yang telah dapat dibuktikan. Jika pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana, maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata. Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah itu membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sebagai contohnya; memberikan pelajaran terhadap anak yang telah meninggalkan sholat dan bersui, mencegah orang gila dari berkumpul dengan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kepadanya.<sup>91</sup>

Adapun *ta'zīr* karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang *mandub* dan mengerjakan yang *makruh* juga termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zīr*? Menurut sebagian ulama usul, *mandub* adalah suatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan, sedangkan *makruh* adalah suatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid*, hlm. 124-125.

<sup>92</sup> Rokhmadi, *Op.cit*, hlm. 197

### BAB III

## SANKSI PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Menurut KUHP

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukum pidana. Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.<sup>93</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut van Hamel arti pidana menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Dalam hal ini semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>94</sup> Dengan adanya sanksi pidana diharapkan seseorang tidak mengulangi perbuatannya dan sanksi menjadi pelajaran bagi orang lain karena sanksi merupakan suatu penderitaan yang harus dihindari oleh setiap orang.

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali apabila tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut S.R. Sianturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu:

---

<sup>93</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 185-186

<sup>94</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 140.

1. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
2. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
3. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.<sup>95</sup> Ketentuan sanksi hukum yang diterima pelaku penganiayaan hewan yaitu berdasarkan KUHP Pasal 302 sebagai berikut :

Pasal 302 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana.<sup>96</sup>

Berdasarkan pasal 302, sanksi yang diberikan kepada pelaku penganiayaan hewan mencakup pidana penjara dan pidana denda. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk mengatasi masalah kejahatan seseorang sedangkan pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya

<sup>95</sup> Schaffmeister, D. *et al*, *Hukum Pidana*, diterjemahkan J.E. Sahetary, (Yogyakarta: Leberty Cet. Ke-2, 2003), hlm. 1

<sup>96</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana penjara.

Dalam Pasal 302 KUHP terbagi menjadi dua yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Penganiayaan ringan terdapat dalam pasal 302 Ayat (1) yang perbuatannya hanya berupa menyakiti atau melukai, tidak memberi makan, adapun ancaman hukumnya berupa pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

Sedangkan penganiayaan berat terhadap hewan terdapat dalam Pasal 302 Ayat (2) kriterianya adalah perbuatannya mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, cacat, luka berat, atau mati dan diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda tiga ratus rupiah.

Sanksi hukumnya baik pidana penjara maupun pidana denda tergantung dari perbuatan yang telah dilanggar oleh pelaku. Di sini hakim bisa memilih besarnya sanksi dan lamanya pidana penjara atau denda sesuai dengan nilai keadilan yang hakim berikan..

Lamintang menjelaskan tentang pembuktian adanya unsur kehendak pelaku dalam melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 302 KUHP. Menurut beliau, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili pelaku, baik itu penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

- a. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan rasa sakit
- b. Adanya kehendak pelaku untuk menimbulkan luka
- c. Adanya kehendak pelaku untuk merugikan kesehatan hewan
- d. Adanya pengetahuan pelaku bahwa perbuatannya itu telah ditujukan pada seekor binatang.

Jika salah satu dari kehendak-kehendak dan pengetahuan pelaku itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka dengan sendirinya juga tidak ada alasan bagi penuntut umum dan hakim untuk menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam Pasal 302 KUHP, dan hakim harus



memberikan putusan bebas bagi pelaku tersebut.<sup>97</sup> Sesuatu pembuktian agar pelaku tergolong kepada tindak kejahatan terhadap hewan, menurut pendapat dari Simons yang harus dibuktikan hanyalah kesengajaan pelaku untuk menimbulkan rasa sakit, atau luka pada seekor binatang atau untuk merugikan kesehatan seekor binatang.<sup>98</sup>

kesengajaan(*opzet*) itu ada tiga macam yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Bahwa kesengajaan bersifat suatu tujuan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka, apabila kesengajaan semacam ini ada pada suatu tindak pidana tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana.
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan seperti sub-2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan). Dalam hal ini ada kesamaan pendapat di antara para sarjana hukum belanda. Menurut Van Hattum dan Hazewinkel-Suringa, terdapat dua penulis belanda, yaitu Van Dijck dan Pompe, yang mengatakan bahwa dengan hanya ada keinsyafan kemungkinan, tidak ada kesengajaan, tetapi hanya mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati.<sup>99</sup>

Adapun pasal lain yang melindungi hewan adalah pasal 406 Ayat (2), bunyi lengkapnya pasal 406 adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan

---

<sup>97</sup> Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2011), hlm. 271

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 272

<sup>99</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 65

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Jenis sanksi dalam pasal tersebut lebih berat dari pasal 302 KUHP mengingat akibat perbuatan pelaku juga berat karena membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Dalam pasal 406 Ayat (2) kepemilikan hewan dimiliki orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya sehingga menimbulkan kerugian kepada orang lain secara langsung baik materiil maupun imateriil.

Pengaturan lainnya terdapat di dalam Pasal 66A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan atau meyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan atau tidak produktif. Selanjutnya Pasal 66A Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Maksud Pasal tersebut menyatakan bahwa penyalahgunaan sebagai tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar dan atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat pegawai negeri sipil atau orang yang berwenang yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Selain itu, ada kewajiban bagi orang yang mengetahui adanya tindak pidana penganiayaan hewan untuk selanjutnya ditindak lanjuti oleh penegak hukum. Laporan adanya tindak pidana sudah menjadi keharusan bagi orang yang mengetahuinya bukan hanya dalam penganiayaan hewan tindak pidana yang lainpun harus dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Dalam penjelasan Pasal 66 ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan dan yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Apabila terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan terhadap hewan, pejabat pegawai negeri sipil yang akan melakukan pemeriksaan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang No. 18/2009 ditentukan bahwa “Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap hewan adalah penggunaan dan pemanfaatan hewan yang tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya seperti; sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan dengan tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memerlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan.<sup>100</sup>

Konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh negara. Hal ini memperkuat oleh pengklasifikasian ilmu hukum, di mana hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang tidak membolehkan campur tangan individu.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

<sup>101</sup> Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2001), hlm. 145

Dalam hukum pidana ada dua masalah yang perlu dijawab dengan jelas, yaitu masalah penentuan :

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>102</sup>

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan penggunaan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk mennaggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>103</sup>

Dengan adanya larangan menganiaya hewan dalam Undang-undang, menjadikan norma hukum yang pasti untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perbuatan tercela dan dilarang oleh hukum. Adanya larangan tersebut minimal masyarakat lebih hati-hati dalam memperlakukan hewan agar memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga setiap hewan kesehatan dan kehidupannya tidak terganggu oleh manusia.

---

<sup>102</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga, 2000), hlm. 35

<sup>103</sup> Sudarto, *Op.cit*, hlm. 48

Meskipun larangannya sudah jelas terdapat dalam KUHP tetapi masih banyak perbuatan penganiayaan hewan bahkan dilakukan secara terang-terangan dengan berbagai alasan. Nampaknya pasal-pasal tersebut juga kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum buktinya banyak kasus tetapi sedikit yang disidangkan di pengadilan.

Tindak pidana penganiayaan hewan perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan terutama peran aktif dari penegak hukum. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana tentu tidak lepas dari peranan kepolisian, jaksa, dan hakim sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Di bawah ini contoh kasus penganiayaan hewan yang pernah terjadi sampai mendapatkan putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran nyata tentang penyelesaian kasusnya.

#### a. Kejadian

Pada hari Selasa pada tanggal 17 September 2013 sekitar pukul 13:30 WIB Don Akbar petugas taman satwa Kandi pergi ke pasar Sapan kecamatan Barangin kota Sawahlunto untuk membeli racun jenis temix, kemudian terdakwa juga membeli 1 (satu) ekor ayam dari temannya. Pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 sekitar pukul 18:30 WIB terdakwa mempergunakan racun temix dengan cara memasukan racun tersebut ke dalam perut ayam lalu ayam tersebut diberikan kepada harimau setelah itu terdakwa pergi meninggalkan harimau tersebut, dan pada hari Jum'at tanggal 20 September 2013 sekitar pukul 10:00 WIB terdakwa mendapatkan berita bahwa harimau telah mati.

b. Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 406 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

c. Tuntutan

Dalam tuntutan pidananya penuntut umum berpendapat bahwa Don Akbar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “membunuh hewan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 Ayat (2). Kemudian penuntut umum menuntut terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan dan menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah)

d. Putusan

1. Menyatakan terdakwa don Akbar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membunuh hewan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Don Akbar oleh karena itu dengan pidana penjara selama (tiga) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);<sup>104</sup>

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan dakwaan tunggal meskipun bisa saja menggunakan dakwaan primer dan subsidier. Dengan dakwaan tunggal tersebut majelis hakim langsung mempertimbangkan satu dakwaan yaitu Pasal 406 Ayat (2) KUHP. Rumusan dakwaan tersebut sesuai dengan unsur-unsur Pasal 406Ayat (2) KUHP yang berisi :

---

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto NO.01/pid.B/2014/PN.SWL

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa terdakwa melanggar pasal 406 Ayat (2) KUHP sehingga penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman tiga bulan penjara, diharapkan terdakwa mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan menjadikan hukuman yang diberikan sebagai pelajaran agar tidak mengulangi lagi.

Dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal di atas, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam pasal 406 Ayat (2) KUHP.

Kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Sehingga dari majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara satu bulan. Sanksi yang diberikan oleh Majelis hakim lebih rendah dari tuntutan penuntut umum yang menuntut tiga bulan penjara.

Meskipun sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan sudah ada tetapi dari segi hukuman sangat ringan padahal perbuatan para pelaku membuat resah masyarakat atas kekejamannya. Dari segi sanksi perlu diperhatikan mengingat sudah tidak relevan sehingga seseorang seenaknya menyakiti hewan dan menghiraukan sanksi yang akan diterima.

Meskipun ancaman sanksi hukumnya telah jelas ada namun dalam kenyataannya, banyak orang yang melakukan kejahatan tersebut tetapi sangat jarang kita mendengar para pelaku itu diusut oleh kepolisian dan diajukan penuntutan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum. Pasal-pasal yang telah dibahas demikian ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya lebih banyak dibiarkan oleh penegak hukum. Penganiayaan hewan merupakan tindakan yang

tidak berperikemanusiaan, terutama jika hal tersebut dilakukan di depan masyarakat umum. Oleh sebab itu sebaiknya pelaku tindakan penganiayaan hewan mendapatkan sanksi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>105</sup>

## **B. Sanksi Bagi Pelaku Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, *jarīmah* didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*omission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>106</sup>

Adapun mengenai ketentuan sanksi terhadap perbuatan penganiayaan yang dilakukan pada hewan. Dalam hukum Islam, ketentuan sanksi tindakan penganiayaan terhadap hewan ini tidak dikenal, tetapi perbuatan ini dikategorikan sebagai kejahatan penganiayaan. Sesuai dengan jenis-jenis *jarīmah* dan sanksinya, maka tindak pidana penganiayaan hewan termasuk *jarīmah ta'zīr*.

---

<sup>105</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta, 1994), hlm.76.

<sup>106</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan agenda*, *Op.cit*, hlm. 20



Dijelaskan bahwa melakukan penganiayaan terhadap hewan adalah haram hukumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَرَكَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغَفِرَ لَهَا بِهِ "

Artinya: Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Isra'il lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu) kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu".<sup>107</sup>

Dan dalam Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " غَضِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ "

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuanhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati. Maka ia masuk neraka karena hal itu. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika menahannya, dan dia pun tidak membiarkannya (melepaskannya) makan dari binatang (rayap) tanah."<sup>108</sup>

<sup>107</sup> HR. al-Bukhari no. 3482

<sup>108</sup> HR. Muslim, no. 2242

Tetapi dalam hadist tersebut hanya menyebutkan secara umum larangan menganiaya hewan, terhadap orang yang menjadi pelaku penganiayaan sanksinya tidak disebutkan secara pasti. Meskipun demikian tidak berarti bagi para pelaku tidak ada hukumnya, sanksi terhadap mereka dapat dikenai dengan *ta'zīr* agar mereka jera dan berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi karena manusia menurut ajaran Islam merupakan makhluk yang mulia sesuai dengan surat al-Isra ayat 70 ;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ  
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (al-Isra : 70)

Berdasarkan hadist nabi sanksi terhadap pelaku penganiayaan hewan tidak ditentukan dengan tegas maka termasuk kategori *ja'rimah ta'zīr*. Yang hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa). *Ulil amri* (penguasa) dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *ja'rimah ta'zīr*. Hukuman *ta'zīr* dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zīr* diterapkan secara definitif, melainkan melihat situasi dan kondisi, dan bagaimana perbuatan *ja'rimah* terjadi, kapan waktunya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi menjamin ketetraman dan kemashalatan umat.<sup>109</sup>

Secara garis besar hukuman *ta'zīr* dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu :

- a. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.

<sup>109</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 4.

- c. Hukum *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perasaan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>110</sup>

Dalam hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan sanksi pelaku penganiayaan hewan, hakim boleh menjatuhkan hukuman dengan sanksi pidana penjara, cambuk, atau yang lainnya sesuai dengan berat ringannya akibat perbuatan pelaku. Hakim juga harus memperhatikan arti *ta'zīr* yaitu mendidik masyarakat supaya menghindari perbuatan tersebut dan mencegah manusia membuat kerusakan di bumi ini.

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *ja'rimah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan macam *ja'rimah ta'zīr* serta keadaan si pelaku. Jadi, hukuman *ja'rimah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

*Ta'zīr* berlaku atas semua orang. Setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim dihukum *ta'zīr* sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi *ta'zīr* agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi *ta'zīr* :

1. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
2. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
3. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku
4. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>111</sup>

Adapun dalam *ja'rimah* dan hukuman *ta'zīr*, kewenangan hakim sangat luas, tetapi tidak berarti boleh bertindak sewenang-wenang. Hal ini oleh karena

---

<sup>110</sup> Djazuli, *Op.cit*, hlm. 185.

<sup>111</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2006), hlm. 93-94

*syara'* menetapkan hukuman *ta'zīr* dengan cara menetapkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang paling ringan seperti peringatan sampai yang sangat berat seperti hukuman mati. Dalam konteks ini, hakim diberi keleluasaan untuk memilih mana di antara hukuman-hukuman tersebut yang paling sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelakunya. Juga dalam menetapkan jumlah besarnya hukuman dari hukuman yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Pemberian kewenangan yang luas kepada hakim tersebut memberikan kemudahan baginya untuk menetapkan suatu perkara pada posisinya dan menghukum pelaku dengan hukuman yang menjaga masyarakat dari perbuatan *jarīmah*, sekaligus memperbaiki pelaku dan mendidiknya.<sup>112</sup>

Hukum Islam menetapkan pandangan yang lebih realistis dalam menghukum seorang tindak pidana penganiayaan hewan, banyak hal yang harus dipertimbangkan serta tujuan adanya hukuman itu sendiri, bagi pelaku tindak pidana penganiayaan hewan harus ada unsur-unsur tertentu yang terpenuhi sehingga dapat melakukan hukuman tersebut, dan apabila tidak terpenuhi unsur-unsurnya maka sanksi atas tindak pidananya dapat diserahkan pada penguasa lokal atau *qodhi* yang disebut dengan istilah *ta'zīr*. Sebab secara umum syari'at Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya baik di dunia maupun kemaslahatan di akhirat kelak.

Selain itu, harus dilihat juga apakah sistem yang ada telah menjamin pemenuhan kebutuhan paling mendasar manusia. *Ta'zīr* lebih bisa menjangkau dalam mengatur dan membatasi norma-norma. Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma-norma moral serta menjadikan syari'at Islam terhadap umatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karimah*, dan juga di dalamnya terkandung tujuan pemidanaan yang dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkan hukum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Dengan adanya hukuman *ta'zīr* tidak ada kekosongan hukum yang berkaitan dengan sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan. Jadi, hukum Islam lebih responsif menyikapi perkembangan hukum yang ada di masyarakat. Meskipun

---

<sup>112</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm. 141-142

demikian nilai keadilan dan kemaslahatan harus menjadi prioritas utama yang dipertimbangkan.

Seorang yang ahli hukum Islam (fiqh) harus menguasai metode *istinbat* hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Permasalahan kontemporer yang selalu berkembang membutuhkan penyelesaian yang diambil dari *nash-nash* al-Qur'an dan hadist. Permasalahan-permasalahan yang bersifat particular atau *juz 'iyyat* dapat dipahami melalui masalah-masalah yang mirip dan serupa (*al asybah wa al nadzair*) di dalam seluruh pokok bahasan hukum Islam atau fiqh.<sup>113</sup>

*Maqasid Syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>114</sup>

Ada yang menganggap *maqasid* ialah *maslahah* itu sendiri, sama dengan menarik *maslahah* atau menolak *mafsadah*. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan *maslahah-maslahah* untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.<sup>115</sup>

Tujuan dari ditetapkannya hukum dalam Islam adalah supaya terciptanya kemaslahatan di dunia dan akhirat sehingga tidak ada korban yang dirugikan. Begitupun larangan penganiayaan hewan dalam KUHP, hukum Islam memandnag dengan larangan tersebut akan tercipta *maslahah* yaitu hak-hak hewan untuk hidup, hak untuk tidak disakiti benar-benar terlaksana. Meskipun perlindungan terhadap hewan, tetapi jika penganiayaan hewan dilegalkan akan mengancam ekosistem yang ada sebagaimana sekarang banyaknya hewan langka karena ulah manusia yang tidak bertanggungjawab.

---

<sup>113</sup> A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015), hlm. 1

<sup>114</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 233.

<sup>115</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 37

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *Jalbu manfaatin*.<sup>116</sup> Sehingga setiap orang tidak berhak untuk menganiaya bahkan membunuh hewan tanpa tujuan dan disia-siakan kemanfaatannya. Larangan tersebut sebagai penegasan bahwa Islam adalah *rahmatan lil alamin* sehingga kasih sayang yang diberikan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada semua makhluk hidup di dunia ini.

Sementara itu, dalam dunia hukum telah terjadi ketidakadilan ilmiah terhadap hukum pidana Islam. Ia tampak tidak dilirik sebagai salah satu sistem hukum pidana yang nyatanya mampu bertahan hidup, malah telah menunjukkan efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan.<sup>117</sup>

Mereka beranggapan bahwa sanksi hukum Islam keji dan tidak berprikemanusiaan seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, *Qisas* bagi pembunuhan disengaja. Mereka hanya melihat hukum Islam hanya dari segi sanksinya. Padahal hukum Islam ditetapkan berdasarkan asas-asas dan alasan yang jelas.

---

<sup>116</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), hlm. 235.

<sup>117</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, *Op.cit*, hlm. 9.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DALAM KUHP

#### A. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagai mana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. *Penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif)<sup>118</sup>

Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.<sup>119</sup>

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. Terhadap “apa yang dilakukan” dan “apa yang diucapkan” disebut *act*, yang oleh sebagian pakar disebut perbuatan positif. Adapun bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian” disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut dengan istilah perbuatan negatif. Baik *act* maupun *omission* merupakan perilaku

---

<sup>118</sup> Teguh Prasetyo, *kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa Media, 2010), hlm. 1

<sup>119</sup> Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1958) hlm. 273

manusia yang dalam bahasa inggris disebut *behavior* dan keduanya tercakup dalam hukum pidana.<sup>120</sup>

Larangan penganiayaan hewan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada hewan dari perbuatan manusia yang akan menyakitinya dengan keji karena tidak sesuai dengan norma kehidupan. Tindak pidana penganiayaan hewan dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap rasa kesopanan masyarakat. Kehidupan sosial manusia dalam pergaulan sesamanya selain dilandasi oleh norma-norma hukum yang mengikat secara hukum, juga dilandasi oleh norma-norma pergaulan yaitu norma-norma kesopanan. Norma-norma kesopanan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal rasa kesopanan bagi setiap manusia dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.

Patokan patut dan atau tidak patutnya suatu tingkah laku yang dianggap menyerang kepentingan hukum mengenai rasa kesopanan itu tidaklah semata-mata bersifat individual, tetapi lebih kearah sifat universal walaupun mungkin mengenai hal tertentu lebih terbatas pada lingkungan masyarakat tertentu.<sup>121</sup>

Larangan penganiayaan hewan sudah diatur sedemikian rupa diharapkan mampu melindungi hewan dari perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia. Adapun Pasal-pasal dalam KUHP yang melarang penganiayaan hewan adalah pasal 302 dan 406 Ayat (2) KUHP yang bunyi Pasalnya sebagai berikut :

Pasal 302 KUHP berbunyi :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :
  1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.
  2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dan seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan

<sup>120</sup> Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 31

<sup>121</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, *Op.cit*, hlm. 1



pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak di pidana

KUHP Pasal 406 Ayat (2) berbunyi :

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.<sup>122</sup>

Menurut R. Soesilo, untuk dapat disebut sebagai penganiayaan terhadap binatang, harus dibuktikan bahwa:

1. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang;
2. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Mengenai unsur “barang siapa” sebagian pakar hukum pidana berpendapat bahwa ”barang siapa” bukan merupakan unsur melainkan hanya untuk memperlihatkan bahwa si pelaku adalah manusia. Akan tetapi, pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutarakan pendapat bahwa “barang siapa” tersebut benar adalah unsur, tetapi perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi, identitasnya “barang siapa” tersebut harus jelas. Kekaburan identitas pelaku dapat membatalkan surat dakwaan.<sup>123</sup>

Ketentuan “barang siapa” menunjukkan secara tegas siapa yang dipandang sebagai seorang pelaku dalam tindak pidana yang kemudian dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Unsur “barang siapa” berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab dalam arti keadaan jiwa orang atau perbuatan harus normal. Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan yang normal dan suatu kedewasaan secara psikis yang membuat orang itu mempunyai tiga macam kemampuan, yaitu:

<sup>122</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>123</sup> Ladden Marpaung, *Op. cit.*, hlm. 9

1. mampu untuk mengerti akan maksud yang sebenarnya dari apa yang dilakukannya.
2. mampu untuk menyadari, bahwa tindakan itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
3. mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan.<sup>124</sup>

Meskipun perbuatannya telah memenuhi semua unsur delik, sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskannya salah satunya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“tidak dapat dihukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna, atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya”

Adanya penentuan atas pertanggungjawaban hukum mempunyai tujuan yang hampir sama dengan tujuan pidana antara lain adalah penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat.<sup>125</sup>

Pengertian unsur “dengan Sengaja” dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan suatu penafsiran resmi atau interpretasi otentik namun demikian dalam praktek peradilan dan doktrin kesengajaan adalah meliputi pengertian sebagai berikut:

- a. sengaja dengan maksud (*ogmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dan maksud atau tujuan dan pengetahuan dan pelaku artinya pelaku benar-benar menghendaki peristiwa itu terjadi.
- b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bijzakerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*). Di sini yang menjadi kesadaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi.

<sup>124</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 205.

<sup>125</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 29.

Pelaku dalam hal ini dipandang telah melakukan tindakan kesengajaan apabila dari perbuatannya itu menimbulkan akibat tertentu yang sebelumnya dapat diperkirakan dengan pasti akan terjadi.

- c. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolu eventualis*). Di sini pelaku dianggap melakukan perbuatan atau akibat tertentu apabila dan perbuatannya tersebut dapat diperkirakan kemungkinan akibat yang akan ditimbulkannya.<sup>126</sup>

Sebagai kebiasaan dalam mencari arti suatu istilah hukum orang menengok ke penafsiran otentik atau penafsiran pada waktu undang-undang yang bersangkutan disusun, dalam hal ini memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*). Dengan sendirinya memori penjelasan (MvP) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti lagi. KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang tersebut pertama. Menurut penjelasan tersebut, “sengaja” (*opzet*) berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut, “senagaja” (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)<sup>127</sup>

Unsur kesengajaan yang secara tegas disebutkan dalam pasal 302 dan pasal 406 Ayat (2) KUHP mensyaratkan hanya penganiayaan yang dengan sengaja yang bisa dipidana. Ini berarti apabila seseorang menyakiti hewan dengan tidak sengaja maka tidak bisa dipidanakan karena perbuatannya dilakukan dengan kealpaannya.

Dalam hal percobaan penganiayaan hewan tidak dapat dipidana. Orang yang telah memiliki niat jahat untuk menyakiti hewan tetapi belum mulai melakukan perbuatannya maka tidak bisa dihukum karena syarat bisa dipidana orang tersebut telah melakukan penganiayaan semisal memukul, menusuk, atau merobek kulit hewan.

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh hewan ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh hewan dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh hewan yang

<sup>126</sup> E.Y. kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 172.

<sup>127</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 113-114

mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh hewan dapat menimbulkan kematian.

Penempatan tindak pidana penganiayaan hewan dalam hukum positif dapat diartikan bahwa hukum selain untuk melindungi kepentingan manusia juga untuk melindungi hewan dari perbuatan penyiksaan karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kriminalisasi terhadap penganiayaan hewan juga menjadi rambu peringatan untuk masyarakat agar senantiasa menjaga perilaku tidak terpuji berupa menganiaya hewan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hewan seharusnya diperhitungkan secara moral karena hewan memiliki kemampuan untuk merasakan sakit. Kemampuan untuk merasakan sakit suatu makhluk hidup menjadi ukuran dalam pengambilan keputusan moral.

## **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**

Dalam kerangka sistem hukum nasional, posisi hukum Islam menempati posisi yang teramat penting. Sebegitu pentingnya hukum Islam, maka tuntutan agar menjadikan hukum Islam sejalan dengan perkembangan zaman juga semakin besar. Paparan mengenai prinsip dan substansi hukum pidana Islam merupakan upaya untuk menciptakan hukum Islam yang sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia. Tidak bisa dikatakan bahwa dalam negara kebangsaan hukum agama haram ikut memperkaya bangunan hukum publik dari negara yang bersangkutan.

Meskipun demikian kita semua harus bisa menyadari bahwa sesuci dan sekuat apa pun tawaran-tawaran hukum (syari'at) keagamaan tersebut tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai hukum positif. Dalam konteks negara kebangsaan hukum agama, termasuk yang dianut mayoritas sekalipun, baru merupakan bahan mentah (*raw material*) seperti halnya hukum adat (adat manapun) atau hukum barat.<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Abu Hapsin, *Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 83

Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman ulama saat itu atas dasar *nash* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits untuk mengatur kehidupan manusia.<sup>129</sup> Prinsip ini menjadi rujukan dalam penetapan dan penerapan hukum Islam dalam menangani kasus penganiayaan hewan Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam Ilmu *Ushul al-Fiqh*-nya menjelaskan bahwa produk hukum apa pun dalam Islam harus mempertimbangkan unsur *maslahat* yang tercakup dalam *al-dharuriyat al-khamsah* yang terdiri dari *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdz al-'aql* (menjaga akal), *hifdz al-din* (menjaga Agama), *hifdz al-mal* (menjaga harta) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan).<sup>130</sup>

Dalam *fiqh jināyah*, al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama yang dijadikan dasar pijakan terhadap segala hal yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan hadits merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas, mengurai pandangan atau konsep al-Qur'an dan sebagai praktek amaliah dari al-Qur'an. Di samping al-Qur'an dan hadits, ada juga sumber lain yaitu *ijma'* dan *qiyas*, kedua sumber hukum ini merupakan sumber hukum yang menjadi pegangan mayoritas umat Islam.<sup>131</sup>

Dalam rangka melindungi hewan Rasulullah telah melarang perbuatan menganiaya hewan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Nasa'i:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْمِصِّصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو  
عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ خَلْفِ يَعْنِي ابْنَ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلِ  
عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ  
وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Daud Al Mishshishi, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah Abdul Wahid bin Washil dari Khalaf yaitu Ibnu Mahran, ia berkata; telah menceritakan kepada kami 'Amir Al Ahwal dari Shalih bin Dinar dari 'Amr bin Asy Syarid, ia berkata; saya mendengar Asy

<sup>129</sup> Said Agil Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), hlm. 6.

<sup>130</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt), hlm. 200.

<sup>131</sup> Yusuf al-Qardawi, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk), hlm. 53.

Syarid berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia maka burung tersebut akan berteriak kepada Allah, dan mengatakan; wahai Tuhanku, sesungguhnya Fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk suatu manfaat."<sup>132</sup>

Larangan menganiaya hewan juga terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'Anhu* suatu kali beliau melewati segrombol pemuda Qurays yang tengah menjadikan ayam sebagai sasaran latihan memanah mereka. begitu melihat Abdullah bin Umar, para pemuda itu segera membubarkan diri. Abdullah bin Umar berkata, 'sesungguhnya Nabi *Shallahu 'Alaihi wa Sallam* telah mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran.<sup>133</sup>

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ تَلَيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ،  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَاهُ بَغِيٌّ مِنْ بَعَايَا  
بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَتَزَعَتْ مَوْقَهَا فَسَقَّتُهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ "

Artinya: Telah bercerita kepada kami Sa'id bin Talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata; Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Ada seekor anjing yang sedang berputar-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Isra'il lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatu itu) kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni karena perbuatannya itu".<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh AN-Nasa'i dalam shahih *An-nasa'i* 7/237 diterbitkan oleh AL-Mathba'ah Al-Misyriyyah bi AL-Azhar

<sup>133</sup> Muttafaq 'Alaih sebagaimana termaktub dalam *Al-Lu'lu wa Al-Marjan* 1279, HR. Al-Bukhari dalam kitab *Ash-Shayd wa adz-Dzaba'ih* 5515

<sup>134</sup> HR. al-Bukhari no. 3482

Dan dalam Shahih Muslim, bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ"

Artinya: Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma', telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma' dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuanhuma, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati. Maka ia masuk neraka karena hal itu. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika menahannya, dan dia pun tidak membiarkannya (melepaskannya) makan dari binatang (rayap) tanah."<sup>135</sup>

Di samping itu, ada etika lain yang dianjurkan oleh Islam, yaitu tidak boleh menyia-nyiakan hewan dengan membunuhnya tanpa ada rencana untuk mengkonsumsi atau memanfaatkannya. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan binatang-binatang itu agar bermanfaat bagi manusia yaitu dengan memakan dagingnya, membuat pakaian dari bulunya, serta meminum susunya. Namun sebagian orang justru menyalahgunakan untuk hal lain yang menyakiti hewan

Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana penganiayaan hewan dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering disebut dengan *ja'rimah*, yaitu larangan syara' yang diancam dengan hukuman *hadd* maupun *ta'zīr*. *Hadd* sendiri merupakan sanksi hukum yang sudah jelas tertera dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits. Sedangkan *ta'zīr* ialah sanksi hukum yang tidak dijelaskan dalam *nash* al-Qur'an maupun hadits, hanya dibebankan pada kearifan seorang hakim.

Dilihat dari sisi keberadaannya, *ta'zīr* sama dengan *hudud*, yaitu sebagai *ta'dib* menuju kemaslahatan dan sebagai pencegahan umum yang macam

<sup>135</sup> HR. Al-Bukhari dalam kitab *Ahadits al-Anbiya*; no. 3482 dan Muslim dalam kitab *as-Salam*, no. 2242

hukumannya berbeda-beda sesuai jenis perbuatan dosa yang dilakukan.<sup>136</sup> Jika pada *ja'rimah hudud* hukumannya sudah ditentukan dan tidak bisa diubah atau diganti, maka pada *ja'rimah ta'zir* hukumannya bermacam-macam, mulai dari nasehat atau peringatan, dera, penjara, dan lain-lainnya bahkan sampai pada hukuman mati kalau yang bersangkutan benar-benar membahayakan. Hakim boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan, pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.<sup>137</sup>

Pada umumnya *ja'rimah ta'zir* tidak dianggap sebagai *ja'rimah* yang berbahaya, sehingga nampaknya tidak mengandung resiko besar jika penentuan jenis tindak pidana dan hukumannya diserahkan kepada kebijakan hakim. Sedangkan pada *ja'rimah* yang dipandang cukup membahayakan, yaitu *ja'rimah hudud* dan *ja'rimah qisas-diyat*, syariat telah menetapkan hukumannya dan hakim tidak diberi kewenangan kecuali menerapkan hukuman sesuai yang telah ditentukan tersebut<sup>138</sup>

Adanya formulasi *ta'zir* menunjukan bahwa dalam pidana Islam tidak hanya pelanggaran *hudud* dan *qisas-diyat* saja yang dikenali sanksi hukuman, tetapi masih ada jenis-jenis perbuatan terlarang lainnya serta perbuatan-perbuatan yang membahayakan tatanan masyarakat, yang diharapkan masyarakat dapat menentukan sendiri sanksi hukumannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa *ja'rimah- ja'rimah ta'zir* merupakan pelengkap yang sangat penting yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak secara khusus disebutkan oleh syara' yang hukumannya dipercayakan kepada masyarakat.<sup>139</sup>

Setiap Undang-undang hukuman (dalam pengertian *uqubah*) dan hukuman-hukuman (dalam pengertian *al-jaza*) yang lain, termasuk dalam kategori penerapan *ta'zir* yang wewenang pelaksanaannya berada ditangan penguasa, yaitu lembaga khusus yang diberi wewenang sesuai dengan undang-undang modern, baik lembaga yudikatif maupun legislatif. Semua itu hendaknya terikat dengan prinsip awal syari'at, yaitu tegaknya masyarakat yang adil, utama dan bertaqwa,

<sup>136</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Hamabi, 1973), hlm. 234

<sup>137</sup> Abdul qodir audah jilid 1 hlm 685

<sup>138</sup> Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang; Walisongo Press, 2008), hlm 35

<sup>139</sup> *Ibid*, 36



yang penerapannya bertujuan untuk mengabdikan kepada tujuan kemanusiaan yang mulia dan merealisasikan apa yang diperintahkan Allah SWT, yaitu bersikap adil diantara seluruh manusia dan memberikan keamanan kepada mereka.<sup>140</sup>

Secara umum Allah SWT memilih hukum setiap masalah. Banyak diantara masalah-masalah itu dibiarkan tandan-tanda dan cara-cara membimbing ulama dalam berijtihad, termasuk hukum-hukum yang telah ada *nash*nya, yang kebanyakan *nash* tersebut tidak pasti petunjuk hukumnya (*zhanni dalalah*), kemudian ulama mengambil dasar *nash* tersebut dari makna-makna yang dikandungnya.<sup>141</sup>

Termasuk dalam hal ini hukum penganiayaan hewan yang petunjuk dilarangnya disebutkan dalam al-Qur'an tetapi tidak secara jelas merinci bentuk hukumannya. Maka, ini menjadi tugas penguasa untuk berijtihad menerapkan sanksi sesuai dengan nilai keadilan yang ditemukan guna mendapatkan kemaslahatan yang sesungguhnya.

Rokhmadi dalam bukunya menyebutkan macam-macam hukuman *ta'zīr* sebagai berikut :

#### 1. Hukuman mati

Para fuqaha secara beragam dalam menerapkan hukuman mati terhadap *ja'rimah ta'zīr*. Menurut Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang berdasarkan Hadist riwayat Abu Dawud. Menurut imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku liwath (homoseksual) baik pelakunya *muhsan* dan *ghairu muhsan*. Dengan alasan hadist riwayat Abu Dawud :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْقَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: dari Ibnu Abbas r.a, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang melakukannya dan pasangannya”

<sup>140</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Op.cit, hlm 108

<sup>141</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 81

## 2. Hukuman cambuk

Hukum cambuk juga berbeda pendapat dalam jumlahnya . menurut Abu Hanifah hukuman cambuk maksimal 39 kali, sedangkan menurut Abu Yusuf boleh sampai 75 kali, kemudian menurut mazhab Syafi'i boleh sampai 75 kali, tetapi tidak boleh melebihi *hadd* qazaf yaitu 80 kali.

## 3. Penjara

Hukuman penjara batas terendahnya atau minimal satu hari dan menurut as-Syafi'iyah tidak boleh melebihi batas satu tahun. Mereka mengqiyaskan kepada hukuman pengasingan dalam *hadd* zina yang lamanya hanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *hadd*.

## 4. Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman *hadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan (*hirabah*) berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 33. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

## 5. Hukuman Salib

Hukuman salib adalah hukuman *jarīmah al-hirabah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengajaran dan pengumuman kesalahan terbuka secara bersama. Menurut Syafi'iyah dan Malikiyyah hukuman salib termasuk juga hukuman *ta'zīr*.

## 6. Nasehat

Hukuman nasehat ini di dasarkan kepada QS. An-Nisa ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Artinya: wanita-wanita yang kamu khawtirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka.

*Nusyuznya* istri dan tidak taatnya ia kepada suami merupakan perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pada

*kifarat* , ia hanya dikenakan hukuman *ta'zīr* berupa nasehat dari suaminya.

## 7. Hukuman Pengucilan

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

## 8. Peringatan Keras

Peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.<sup>142</sup>

Menurut Penulis tindak pidana penganiayaan hewan termasuk *ja'īmah ta'zīr* maka jenis hukumannya diserahkan kepada hakim karena tidak termasuk *ja'īmah hudud* dan *qisās-diyāt* yang hukumannya sudah diatur oleh nash *syara'*. Hukuman dalam *ja'īmah ta'zīr* tidak ada kepastian dalam jumlah hukuman dan hukuman *ta'zīr* bertujuan untuk mendidik atas perbuatan pelaku. Jadi dalam memberikan hukuman kepada pelaku penganiayaan hewan bisa hukuman cambuk, penjara, dan sebagainya tergantung hakim menilai perbuatan dan akibat perbuatan pelaku.

Hakim diberi hak memilih diantara sekumpulan hukuman yang menurut pandangannya dapat mendidik, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh memperingan atau memperberat hukuman yang akan diberikan. Prinsip keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Prinsip keadilan menjadi asas hukum yang harus ditegakan oleh hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Shaad ayat 26 :

---

<sup>142</sup> Rokhmadi, *op. cit*, hlm 200-204

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ  
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dasar hukum Islam dalam melindungi hewan jauh lebih kuat dan akurat dibanding hukum positif, sebab hukum pidana Islam berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya. Di sisi lain dengan *ja'rimah ta'zir* yang mengancam pelaku penganiayaan hewan memiliki beberapa alternatif hukuman mulai dari nasehat, peringatan keras, penjara dan sebagainya sehingga hukuman yang akan diberikan menyesuaikan perbuatan pelaku. Namun karena hukum pidana Islam belum bisa diterapkan di Indonesia, maka sebagai warga negara wajib untuk mematuhi hukum yang telah ditetapkan oleh negara walaupun sebenarnya di Indonesia sebagian besar warga negaranya adalah beragama Islam.

Hukum yang ditetapkan penguasa/hakim sudah menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk mentaatinya karena hal tersebut sudah disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan *ulil amri* di antara kalian.”

Larangan penguasa terhadap penganiayaan hewan sudah memenuhi tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan dan mengatur perbuatan manusia. Selain ayat di atas, kewajiban mematuhi perintah penguasa juga terdapat dalam kaidah

fiqh yang mashur yaitu *حكم الحاكم إلزام يرفع الخلاف* (Artinya: Keputusan hakim adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus perbedaan)<sup>143</sup>

Penguasa adalah orang yang memiliki wewenang dalam mengatasi berbagai perselisihan dalam masyarakat. Ketentuan pemerintah yang benar dan tidak menyimpang dari syari'at tidak boleh dilanggar. Dalam larangan penganiayaan hewan tentu ada yang setuju dan ada yang tidak setuju tetapi perbedaan itu sudah diselesaikan dengan larangan pemerintah melalui undang-undang untuk tidak menganiaya hewan sehingga semua orang harus mentaati peraturan yang sudah berlaku sebagai upaya pengaturan kehidupan yang lebih baik.

---

<sup>143</sup> Muhammad bin Syihab al-D`n al-Ramli, *Fatāwā al-Ramli bi Hāmisī al-Fatāwā al-Kubra al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm 113.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam persepektif hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Pasal 302 (KUHP) tentang penganiayaan hewan, perumusan delik penganiayaan hewan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan, karena kejahatan disini mengandung sifat aniaya dan perbuatan yang tidak sopan terhadap hewan. Melihat kriteria mengenai tindak pidana penganiayaan hewan yang terlarang atau yang tertuang dalam ketentuan hukum tersebut dinyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku penganiayaan hewan adalah dengan pidana penjara dalam Pasal 302 paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah untuk penganiayaan ringan dan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda tiga ratus rupiah, dan dalam Pasal 402 Ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).  
Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam pelaku penganiayaan hewan dikenakan hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa atau hakim karena *ja'rimah* tersebut tidak disebutkan dengan jelas oleh *nash*. Hukuman *ta'zīr* yang akan diberikan kepada pelaku tergantung kearifan hakim menggali nilai keadilan di masyarakat dan kondisi si pelaku saat itu mulai dari nasehat, penjara, pengasingan, hingga yang paling berat adalah hukuman mati sehingga antara kasus satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda hukumannya.
2. Dalam perspektif hukum positif, tindak pidana penganiayaan hewan merupakan perbuatan keji dan menyakiti sehingga tidak sesuai dengan norma kehidupan. Menganiaya dianggap perbuatan yang tidak patut yang menyerang kepentingan hukum karena hewan memiliki hak untuk hidup

dan terbebas dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 402 Ayat (2) KUHP.

Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, larangan penganiayaan hewan dalam Pasal 302 dan Pasal 406 Ayat (2) dapat ditemukan dalam *nash* al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan secara detail mengenai penganiayaan hewan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi setiap hak makhluk hidup termasuk hak hewan untuk hidup. Islam juga melarang manusia melakukan perbuatan menganiaya hewan karena tidak mencerminkan akhlaq yang baik, dan kejam kepada makhluk hidup. Di samping itu, ada etika lain yang dianjurkan oleh Islam, yaitu tidak boleh menyia-nyiakan hewan dengan cara menganiaya, membunuhnya tanpa ada rencana untuk mengkonsumsi atau memanfaatkannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan kepada penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa, Hakim agar KUHP dijadikan pedoman dalam upaya penegakan hukum bagi pelaku penganiayaan hewan di Indonesia. Upaya penanggulangan delik terhadap hewan ini dapat berjalan secara efektif dengan sarana proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan.
2. Disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan penganiayaan hewan karena tidak dibenarkan oleh negara dan agama
3. Disarankan kepada akademisi, dosen, mahasiswa untuk mengkaji kembali tindak pidana penganiayaan hewan supaya ditemukan hukuman yang sesuai agar tidak terjadi lagi perbuatan penganiayaan hewan.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang dapat penulis tulis, besar harapan penulis dengan adanya skripsi tentang kajian tindak pidana penganiayaan hewan ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan penegakan hukum khususnya tindak pidana penganiayaan hewan.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dari penulisan karya ilmiah ini dan jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan sangat mengharapkan saran maupun arahnya dari pembimbing dan penguji pada khususnya, serta kepada seluruh pembaca skripsi dari hasil tulisan penulis ini. Semoga karya ini menjadi salah satu sarana bagi kita semua untuk menambah ilmu dan ketaqwaan kita semua kepada Allah SWT. Aamiin.



## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Muhamad Iqbal  
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 25 Juli 1996  
Alamat : Desa Kedungwungu RT/RW : 005/001, Kecamatan  
Jatinegara, Kabupaten Tegal  
Nomor HP : 087720152424  
E-Mail : muhammadsaiox25@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 02 Kedungwungu
2. MTs Ma'hadut Tholabah Tegal
3. MA Al-hikmah 02 Brebes
4. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 12 April 2020



Muhamad Iqbal  
1502026041

## A. Daftar Pustaka

### Buku

- Audah Abd Al-Qodir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Dar Al-Kitab Al- A'rabi, Beirut, tanpa Tahun
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002)
- Al-Munawar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004)
- al-Qardowi, Yusuf, *Membumikan Syariat Islam*, (terj, Muhammad Zaki, dkk)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah wa al-Walayah al-Diniyyah*, (Mesir: Mustafa al Babi al-Hamabi, 1973)
- Arief, Barda Nawawie, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2008)
- Arief, Barda Nawawie, *Kebijakan Legislatif: dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang, Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga, 2000)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rinec Cipta, 1993)
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cet. 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika 2004)
- Bemmelen M van, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, *Terjemahan Hasnan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
- Bahreisj, Hussein, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta : Widjaya, 1983)
- Chawazi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005)
- Chawazi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Chawazi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Dirjosisworo, Soedjono, *Amalan ilmu jiwa dalam studi kejahatan*, (Bandung: Karya Nusantara 1994)
- Djazuli, Ahmad, *Fiqih Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986)
- FHIPK-UI, *Simposium Indonesia-negara hukum*, Jakarta, 1966.
- Gunadi, Ismu, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at islam Menurut Ajaran Ahli Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971),
- Hapsin, Abu, *Kontribusi Konsep Keadilan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengembangan Konsep Keadilan Hukum Pidana Positif*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010)

- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu, 2009)
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Haryatmoko, *dominasi Penuh Muslihat: Akar Kekerasan dan Diskriminasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Hanitijo Ronny, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Remadja Karya, 1985)
- HR. al-Bukhari dalam az-Zakat, Muslim dalam al-Libas..
- HR. Ahmad, Ibnu Majah dalam al-libas, al-Bukhari dalam adz-Dzaba'in, Muslim dalam al-Libas,
- HR. Muslim dalam Shahihnya, kitab as-Salam
- HR. Al-Bukhari dalam kitab Ahadits al-Anbiya
- Ichsan Muchammad dan Susila Endrio, *Hukum Pidana Islam Sebagai Alternatif* (Yogyakarta: Lab Hukum FH UII, 2008)
- Ichwan Mohammad Nor, *Studi Ilmu Hadist*, (Semarang: Rasail Media Group, 2007)
- Ihsan, A. Ghozali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015)
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta, 2012)
- Irfan, Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015)
- Irfan, M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah 2006)
- Jahar, Asep Saepuddin *et al*, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Kealan, Zubaidi Achmad, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2010),
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Da'wah Islamiyah al-Azhar, tt)
- kanter , E.Y. dan Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002)
- Kamal, Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, terjemah : Abu Ihsan, (Jakarta:Pustaka At-Tazkia, 2006), hlm. 319
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, (Jakata, Sinar Grafika, 2011)
- Marpau, Ledeng, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Marwan, M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya : Reality Publisher, 2009)
- Mushlih Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004)
- Mushlich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Munajat, Makhrus , *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Maulidi Achmad, "Pengertian data primer dan data sekunder"
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung, Refika Aditama 2009)
- Munawir, Warson, Ahmad, *Kamus Almunawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984)
- Muhammad bin Syihab al-D`n al-Ramli, *Fatāwā al-Ramli bi Hāmisy al-Fatāwā al-Kubra al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm 113

- Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI, 2001)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta. Rineka Cipta 1993)
- Mulyono, Bambang, *Kenakalan remaja dalam perspektif pendekatan sosiologi psikologi dan penanggulangannya*. (Yogyakarta: 1986)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2011),
- Marpaung, Laden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Ojungu Omar, *Interaksi Manusia dengan Alam*, (Jakarta: Pelita Ilmu, 1991)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
- Prasetyo, Teguh, *kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung, Nusa Media, 2010)
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT. RefikaAditama, 2002)
- Qayyim, Ibn al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996)
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994)
- Rasyid Mochamad Riyanto, *Kekerasan di Layar Kaca*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2013)
- Rahman Abdur, I. Doi, *Hudud dan Kewarisan Syari'ah II*, penerjemah: Zaimudin dan Sulaiman Rusydi dalam Syari'ah The Islamic Law, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, (Jakarta, 1994)
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang; Walisongo Press, 2008)
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015)
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *et al*, *Fatwa-fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Schaffmeister, D. *et al*, *hukum pidana*, diterjemahkan J.E. Sahetary, (Yogyakarta: Leberty Cet. Ke-2, 2003)
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: al-Maarif, 1990)
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)
- Santoso, Topo, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016)
- Shadily, Hassan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pembangunan, 1958)
- Soekanto, Soedjono, *Hukum pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997)
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008)
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2008)

Usman Suparman, *Hukum Islam (Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Gaya Media pratama, 2002)

Wiyono, R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Zahrah, al-Imam Muhammad Abu, t.th., *al-Jarimah*, (Mesir: Dar al- Fikr al-Arabi)

Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VI, Dar Al-Fiqr, Damaskus, 1989.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Mampow Jonathan Toar, *Suatu Kajian atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Ilmiah Lex Administratum Vol. V no. 2, April 2017

Chandra Widya Dika, *Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmiah Novum vol. 3 no. 1, September 2019

FHIPK-UI, Simposium Indonesia-negara hukum, Jakarta, 1966, hlm. 159.

Resolute Prisilia. *Humanizing the Non-Human Animal: the Framing Analysis of Dogs'Rights Movement in Indonesia*. Jurnal Sosiologi pada Pusat Kajian Sosiologi FISIP-UI. Jakarta 2016

UU No. 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan